

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada kebanyakan negara berkembang, pembangunan lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi ini tidak terlepas dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dapat dicerminkan oleh timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tidak terlepas dari peningkatan pendapatan riil dan pendapatan per kapita, juga meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, meningkatkan hubungan ekonomi antar wilayah dan terwujudnya transformasi kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Namun jika proses pembangunan itu tidak terencana dan terlaksanakan dengan baik, maka akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan juga akan menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri, hingga penyediaan berbagai sarana pembangunan ekonomi menjadi labat, hingga paling parahnya akan mengakibatkan kegagalan dalam usaha pembangunan tersebut. Oleh sebab itu analisis yang matang tentang rencana pembangunan ini akan sangat menentukan hasil usaha meningkatkan pembangunan ekonomi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara tak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah, adapun salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur dan menilai pertumbuhan ekonomi adalah melalui perhitungan Produk Domestik

Bruto (PDB) dan untuk suatu daerah atau wilayah tertentu dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto untuk keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam periode tertentu. PDRB tersebut terbagi berdasarkan lapangan usahanya yakni menjadi beberapa sektor. Sektor-sektor inilah yang akan mendukung proses pertumbuhan ekonomi untuk menunjukkan sejauh mana aktifitas bidang ekonomi dapat menghasilkan tambahan pendapatan ekonomi masyarakat yang juga dapat pula digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dan capaian pembangunan ekonomi, serta sebagai penentu arah pembangunan yang akan datang.

Keseriusan pemerintah dalam usaha pembangunan daerah ini tercermin dari munculnya gagasan sistem otonomi daerah, dan untuk mendukung sistem tersebut dikeluarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kehadiran undang-undang ini menjadikan daerah lebih demokratis dalam mengambil keputusan dan dalam menggali sumber pendapatannya sendiri. Undang-undang tersebut kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, otonomi daerah ini dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang nyata, seluas-luasnya, dan

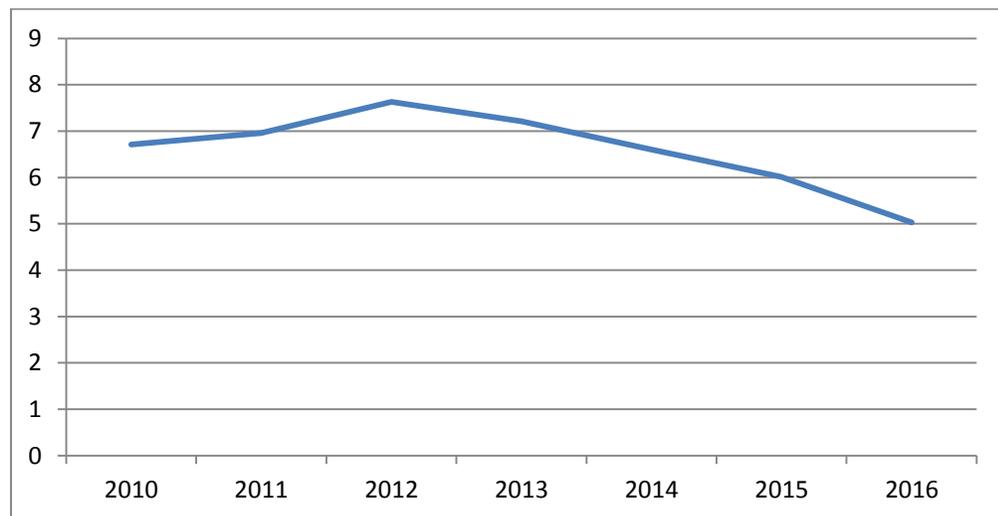
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Adanya keanekaragaman kondisi fisik serta geografi masing-masing daerah ini menciptakan potensi yang berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah yang lain, potensi-potensi ini berkaitan dengan karakteristik dari masing-masing daerah tersebut. Sejak berlakunya otonomi daerah tahun 2001, seharusnya pemerintah daerah bisa lebih leluasa dalam meningkatkan pembangunan wilayahnya demi mendukung pembangunan nasional yang akan memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2002, Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang secara keseluruhannya terdiri dari 5 Kabupaten yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2 Kota yakni Kota Tanjungpinang, Kota Batam. Adapun luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 252.601 Km², di mana sekitar 96% merupakan lautan dan hanya sekitar 4% wilayah darat. Provinsi ini mempunyai letak geografis yang cukup strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur serta

berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Negara Singapura. Selain itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan letak geografisnya yang strategis ini dan di dukung potensi alamnya yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau ini dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan.

Gambar 1.1 berikut memperlihatkan grafik fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (%) Periode 2012—2016 :



Sumber : BPSProvinsi Kepulauan Riau, diolah

GAMBAR 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau(%) Periode 2012-2016

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 berada pada level 6,71%. Kemudian pada tahun 2011 mengalami percepatan pertumbuhan, hingga pertumbuhannya berada pada level 6,96%. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau kembali meningkat hingga mencapai

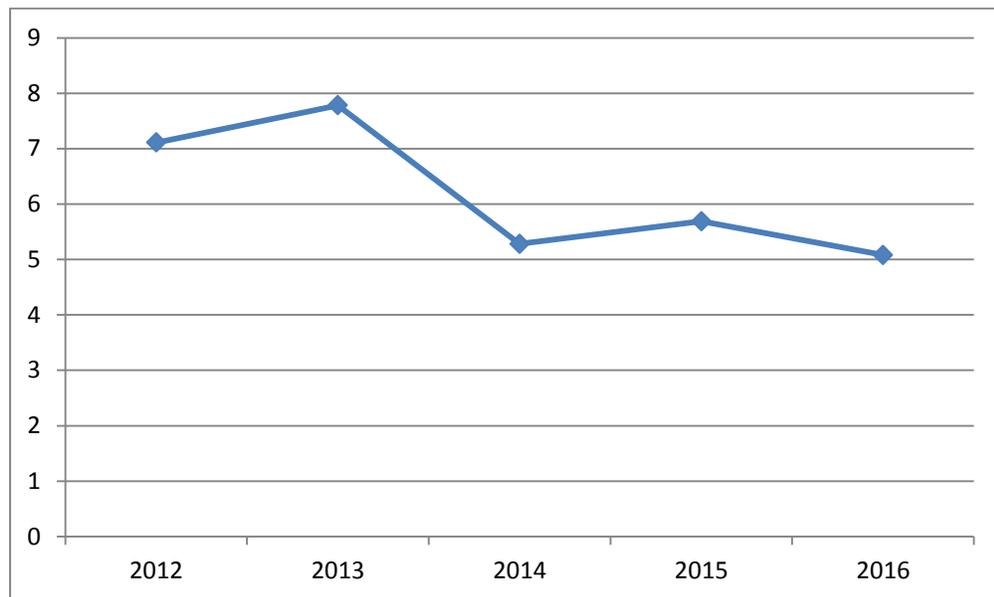
level 7,63%. Namun pada tahun berikutnya laju pertumbuhan ini melambat. Tahun 2013 laju pertumbuhannya sebesar 7,21%. Selanjutnya pada tahun 2014 laju pertumbuhan Provinsi ini kembali menurun menjadi 6,60% dan kembali menurun di tahun 2015 di angka 6,01% terus menurun 0,98 poin di tahun 2015 menjadi 5,03% di tahun 2016.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau semakin memburuk, padahal saat ini di beberapa daerah Kepulauan Riau yakni Batam, Bintan, dan Karimun tengah diupayakan sebagai pilot project dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura.

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 kabupaten dan 2 kota dengan Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus merupakan Ibukota Provinsi tersebut. Kota ini terletak di Pulau Bintan dengan posisi geografis berada pada 00 51' s/d 00 59' LU, dimana daerah ini merupakan dataran rendah dan kawasan rawa bakau sehingga memudahkan upaya pengembangan kota. Adapun luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 Km² dengan karakter daerah berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai tepi laut.

Menurut Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Tercatat pada tahun 2012 laju pertumbuhan riil PDRB Kota Tanjungpinang sebesar

7,11% dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 7,78% namun turun dratis di tahun 2013 pada angka 5,28% dan meningkat lagi tahun 2015 menjadi 5,69% namun di tahun 2016 kembali turun di angka 5,08% yang mana ini adalah angka terendah dari tahun 2012-2016.



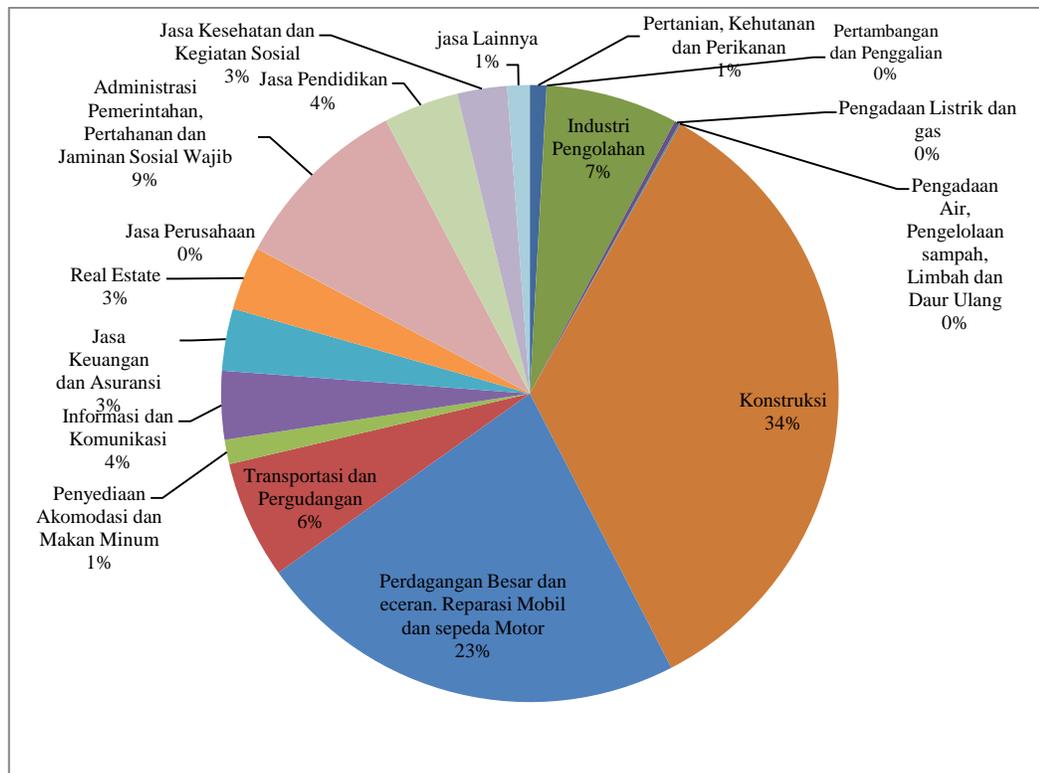
Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2017, diolah

GAMBAR 1.2

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tanjungpinang Menurut Lapangan Usaha(%) 2012—2016

Data PDRB terbaru tahun 2016 menunjukkan bahwa sektor penyumbang PDRB ADHK terbesar Kota Tanjungpinang adalah sektor konstruksi yakni sebesar 34% penyumbang PDRB ADHK Kota Tanjungpinang terbesar selanjutnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yakni sebesar 23% selanjutnya penyumbang PDRB terbesar lainnya adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial

wajib dengan persentase sebesar 9%. Adapun persentase sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB ADHK Kota Tanjungpinang secara lengkap dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, diolah

GAMBAR 1.3

Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Tanjungpinang 2016

Perubahan Struktur ekonomi merupakan sebuah akibat dari aktifitas ekonomi yang terus bergerak secara berkesinambungan. Adapun Perubahan struktur ekonomi Kota Tanjungpinang ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Pada lima tahun terakhir sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib selalu menempati tiga besar sektor penyumbang PDRB terbesar di Kota Tanjungpinang. Pada 2012 kontribusi yang diberikan oleh sektor konstruksi tetap sama seperti tahun 2016 yakni sebesar 34%, sedangkan pada 2013-2015 kontribusi sektor ini stagnan pada angka 35%. Adapun sektor penyumbang PDRB tertinggi kedua selama lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dimana pada tahun 2012-2013 kontribusi sektor ini berada pada angka 20%, dan meningkat di tahun 2014 dan 2015 pada angka 22%. Kontribusi sektor ini terus naik di tahun 2016 yakni sebesar 23%. Berikutnya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib selalu menempati posisi tertinggi ketiga dalam berkontribusi pada PDRB ADHK Kota Tanjungpinang. Adapun kontribusi sektor ini dalam lima tahun terakhir tetap sama yakni sebesar 9%. Perubahan struktur ekonomi yang minim ini dikarenakan belum dioptimalkannya sektor-sektor basis dan sektor-sektor unggulan yang lainnya.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Kota yang berpotensi tinggi, dilihat dari letak geografisnya dan juga potensi alam serta infrastrukturnya dan sarana prasarannya. Selain itu, kedudukan administrasi Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi mendorong adanya keharusan pembangunan yang terus menerus ditingkatkan di Kota Tanjungpinang ini. Namun pada kenyataannya, tahun 2016 ini pertumbuhan ekonomi kota Tanjungpinang mengalami angka terendah dalam lima tahun terakhir, yakni berada pada angka 5,08% meskipun

angka tersebut masih di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, namun persentase kemiskinan di Kota Tanjungpinang masih sangat tinggi dibandingkan persentase kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan persentase kemiskinan Kota Tanjungpinang menempati posisi tertinggi kedua di Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir ini. Tabel 1.1 berikut menyajikan data persentase kemiskinan Kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau :

TABEL 1.1

Persentase kemiskinan Kota Tanjungpinang (%), 2012-2016

| Wilayah | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Karimun | 6.37 | 6.69 | 6.85 | 6,60 | 6,77 |
| Bintan | 6.29 | 6.23 | 6.09 | 6,07 | 6,43 |
| Natuna | 4.25 | 3.78 | 4.11 | 4,34 | 4,33 |
| Lingga | 14.15 | 14.03 | 14.75 | 14,95 | 14,36 |
| Kepulauan Anambas | 4.17 | 4.47 | 4.91 | 6,58 | 6,73 |
| Batam | 5.89 | 5.2 | 5.3 | 5.08 | 4.68 |
| Tanjungpinang | 11.03 | 10.4 | 9.94 | 9.56 | 9,34 |
| Kepulaun Riau | 6.83 | 6.35 | 6.4 | 5.78 | 5.84 |

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekitar 9,34% penduduk di Kota Tanjungpinang hidup dalam garis kemiskinan, jadi sekitar 19.123 jiwa penduduk di Kota Tanjungpinang masih tergolong penduduk miskin ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan sektor-sektor mana yang benar-benar

potensial untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan daerah yang mana tentu saja akan meningkatkan perekonomian penduduknya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“Analisis Sektor Basis Dan Sektor Unggulan Sebagai Pendorong Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Di Kota Tanjungpinang (Tahun 2012-2016)”**

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik penelitian dan juga menjadi lebih terarah, maka peneliti menentukan batasan masalah pada penelitian ini yakni pada pengkajian Sektor ekonomi unggulan yang sangat berpotensi dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan pendekatan PDRB periode 2012-2016.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Sektor apakah yang berpotensi besar menjadi sektor basis dan non basis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang?
- b. Bagaimana struktur perekonomian, kinerja dan produktifitas kerja sektor-sektor di perekonomian Kota Tanjungpinang dibanding Provinsi Kepulauan Riau?

- c. Sektor apakah yang berpotensi besar untuk mendorong dan memajukan pembangunan ekonomi daerah-daerah tertinggal, sedang tumbuh, dan maju namun tertekan di Kota Tanjungpinang?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut :

- a. Untuk mengetahui sektor apakah yang berpotensi besar menjadi sektor basis dan non basis untuk menunjang pertumbuhan bagi perekonomian Kota Tanjungpinang.
- b. Untuk mengetahui struktur perekonomian, kinerja dan produktifitas kerja sektor-sektor di perekonomian Kota Tanjungpinang di banding Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Untuk menentukan sektor apa yang berpotensi tinggi dalam memicu pengembangan pembangunan ekonomi daerah di Kota Tanjungpinang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam menggali dan mengkaji lebih khusus potensi sektor-sektor unggulan yang berada di daerah Kota Tanjungpinang dan

juga dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang.

- b. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan tentang pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun, dan juga menjadi informasi tentang sektor unggulan dan basis di Kota Tanjungpinang.
- c. Untuk penulis, diharapkan adanya penelitian ini dapat menjadi sarana implementasi dan penerapan ilmu-ilmu yang telah didapatkan saat perkuliahan.
- d. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi berupa sumbangan pemikiran dan bahan masukan agar mendorong penelitian mendatang yang lebih baik lagi.